

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara obstruction of justice yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis terhadap Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Advokat, Korupsi.

ABSTRACT

This research aims to determine criminal sanctions against advocates who commit acts of obstructing the investigation process in criminal acts of corruption and the law enforcement process against advocates who commit criminal acts of obstructing the investigation process in cases of criminal acts of corruption. This research is normative juridical research. The results of the research are criminal sanctions against advocates who commit acts of obstructing the investigation process in criminal acts of corruption, namely the crime in Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code (KUHP). The process of law enforcement against advocates who commit criminal acts of obstructing the investigation process in cases of criminal acts of corruption, namely the cassation decision handed down by the Supreme Court regarding the obstruction of justice case committed by Lucas does not provide the value of justice because Lucas' case is related to obstructing investigations while the Eddy Sindoro case is related to bribery of clerks. Eddy Sindoro was sentenced to 4 (four) years for a corruption case, while Lucas was given a sentence of 3 (three) years in connection with obstructing an investigation carried out by a lawyer so that it had nothing to do with disparities. In fact, it eliminates the philosophical essence of Article 21 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and the code of ethics for advocates.

Keywords: Law Enforcement, Advocates, Corruption